

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM
PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITA KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(Studi Kasus Pada BPKD – Kabupaten Bandung Barat)

Alfarizi Riwandani

21114028

PROGRAM STUDI AKUNTANSI – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to find out whether Performance Based Budgeting and Financial Reporting Systems affect the accountability of Government agencies with case studies in the Regional Financial Management Agency (BPKD) – West Bandung Regency. The Method used was employees of the Regional Financial Management Agency with one hundred and five respondent. The stastical test used is the validity test and reliability test. Data analysis techniques used SEM Partial Least Square (PLS) analysis with help of Smart PLS software.

Based on the results of testing the known hypothesis that Performance Based Budgets Have Significant Effects on Performance Accountability of Government Agencies and Financial Reporting Systems have a significant influence on the Performance Accountability of Government Agencies.

Performance Based Budgets significantly influence the Performance Accountability of Government Agencies in 105 people from the BPKD Subdivision of the West Bandung Regency Government with an influence contribution of 39.8% While the financial reporting system significantly influences the performance accountability of Government Agencies in 105 people from the BPKD Subdivision of the West Bandung Regency Government with a contribution of 51.9%.

Keywords: Pergormance Based Budgeting, Financial Reporting System, Performance Accountability of Government Agencies

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sekarang ini dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tervermin dari kinerja organisasi sector public yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas (Bahri, 2012). Salah satu unsur reformasi sector public adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota arahan yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sulisiana, 2013). Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah efektif, efisien, professional dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas public (Komang Sri Endrayani, 2014).

Anggaran berbasis kinerja yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja

penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal (Laura wahdatul, 2012). Melalui *proses* anggaran berbasis kinerja pemerintah kota/kabupaten menetapkan keluaran dan hasil dari masing-masing program pelayanan, kemudian pemerintah daerah dapat membuat target untuk pencapaiannya, dengan demikian pengeluaran dilakukan berdasarkan prioritas dan unit kerja harus bertanggung jawab terhadap hasil output dan outcome (Adisasmita, 2011:52).

Namun pada kenyataannya, Sumiyati (2015) selaku Kepala Badan pendidikan dan pelatihan Keuangan mengemukakan bahwa, terjadi empat permasalahan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, permasalahan itu menyangkut *governance*, ownership pimpinan, Sumber daya manusia dan Sistem Informasi. Dalam *governance* mempunyai masalah dalam penerapannya, apakah sudah menggunakan prinsip *let's managers nabage?* Seharusnya yang di fokuskan pengendalian pada *outcome/output* tidak hanya pada inputnya saja. Dan dalam sistem peranan auditor harus dapat membangun sistem, bukan hanya mengejar kesalahan, tetapi perbaiki arsitektur kinerja dalam proses kedepan. Sedangkan dalam permasalahan ownership pimpinan perlu memiliki waktu untuk membangun *logi model*, pada tingkat strategis. Perlu *proses* yang intensif untuk membangun *logic model* antara

instansi dan terakhir permasalahan dalam SDM, semua manajer perlu menguasai tentang arsitektur kinerja dan *logic model*. Hal ini sangat krusial disaat manajer suatu organisasi tidak mebagun pola *logic model* dengan baik, maka akan membuat penilaian akuntabilitas terhadap kinerja pun akan menrun, karena peran manaje yang memiliki kuasa akan sedikit menyulitkan.

Sistem Pelaporan Keuangan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengioperasikan anggran yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengembalikan keputusan ekonomi, social dan politik oleh pihak pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2011:159). Tujuan umum pelaporan keuangan sector public adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pamakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Bastian, 2010 : 297).

Pada tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Pemerintah Kota Bandung yang masih bermasalah dalam hal laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Bandung. Penilai itu menunjukkan bahwa belum ada perkembangan yang signifikan dalam penelolan keuangan Pemerintah Kota Bandung sehingga Pemerintah Kota Bandung terus gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Masalah yang paling utama yang dialami oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu masalah penelolan asset dimana beberapa asset miilik pemerintah Kota Bandung belum teradministrasikan dengan baik dan juga asset-aset yang statusnya masih tidak jelas. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuanga (BPK), persoalan asset tersebut menyangkut asset tetap yang belum tertib yaitu penyajian asset tetap yang belum didukung dengan daftar rincian, pencataan ganda, dan penomoran atau kodifikasi yang belum dilakukan sehingga harus dibentuk pansus penataan asset daerah yang bertugas mendata ulang lebih rinci jumlah asset milik Pemerintah Kota Bandung.

Meneurut Holid Nurjamila (2017) Selaku Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembagunan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 50-65 atau peringkat “CC”, halini dikarenakan tidak mampuan Pemkab dalam mendefinisikan kinerja, ketidak mapuan menyusun indicator kinerja, seta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran

selain itu LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implimentasi bekum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dari penelitian ini diantara nya dilakukan oleh Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) menyatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oelh Laura Wahdatul, Sri Rahayu, Vaya Juliana Dillak (2016) menyatakan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kierja Instansi Pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka penulis dapat menuliskan rumuan masalah penelitian sebaga berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta.

C. Maksud dan tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalaha untuk mencari kebenaran dalam topik penelitian Pengaruh Anggaran

Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah yang ada dikota maupun kabupaten.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pelaporan Keuang terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ada dikota maupun Kabupaten.

2. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Hipotesis

A. Anggaran Berbasis Kinerja

Indra Bastian (2010:202) menyebutkan bahwa anggran berbasis kinerja adalah Sistem penganggran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta tencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*).

Mahmudi (2010:158) menjelaskan bahwa anggran berbasis kinerja yaitu Sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dikatakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah

sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan danamengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan perencanaan strategis suatu organisasi untuk menvapai hasil yang optimal.

B. Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Riawan Tjandra (2009:43) dalam tulisannya, memandang anggaran berbasis kinerja adalah saat ini dinilai sebagai suatu pilihan sistem penggaran yang mampu menstimulasi manajemen birokrasi yang mengac pada prinsip efektifitas, mengefisienkan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program/proyek dan pendaptan infrastruktur public menstimulasi keterbukaan dalam akuntabilitas pemerintah, dan melakukan penghematan uang Negara tanpa melalaikan prinsip-prinsip profesionalitas.

Dalam konsep implementasi anggaran berbasis kinerja yang jelas diatas, ada kondisi-kondisi yang sangat wajib diperlukan dalam penggaran berbasis kinerja menurut Riawan Tjandra (2009:44), yaitu:

- a. Orintasi yang sama pada hasil
- b. Penerapan rencana kerja tahunan
- c. Pengembangan idikator kinerja
- d. Sistem Pengumpulan data kinerja

C. Sistem Pelaporan Keuangan

Indra Bastian (2010:298) menyatakan bahwa adapun kreteria sistem pelaporan keuangan yang baik

apabila laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Standara Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Instansi Pemerintah menerbitkan laporan keuangan yang dijelaskan dala persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik.

Berdasarkan definisi para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan keuangan adalah suatu proses laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.

D. Indikator Sistem Pelaporan Keuangan

Peneliti mengambil indikator untuk Sistem Pelaporan Keuangan Menurut Dwi Prastowo (2011:7) yang diikhtisarikan karakteristik pelaporan keuangan yaitu:

- a. Dapat dipahami
- b. Relevan
- c. Keandalan
- d. Dapat diperbandingkan

E. Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah

Mahmudi (2010:28) menyatakan bahwa Akuntabilitas kinerja adalah pertanggung jawaban lembaga public untk pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Abdul Halim (2012:20) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiabn untuk memberikan pertanggung

jawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, pada hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban dan keterangan.

Berdasarkan pemaparan definisi oleh para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien, serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban dan keterangan.

F. Indikator Akuntabilitas Instansi Pemerintah

G. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Dedi Nordiawan (2011:27) bahwa kelemahan anggaran berbasis kinerja hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukur dan melaksanakan analisis biaya dan banyak jasa dan aktivitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang keluar, terkadang aktivitas diukur biaya secara detail dan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai

yang diperlukan atau tidak adanya aktivitas itu sendiri.

Bahri (2012) pada pendekatan anggaran kinerja dilaksanakan untuk terciptanya suatu akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

H. Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mahmudi (2016:251) menyatakan bahwa instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pelaporan Keuangan yang baik. Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan Negara, pemborosan anggaran, inefisien organisasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adanya lemahnya sistem laporan keuangannya.

indra Bastian (2010:297) mengungkapkan bahwa, hubungan antara Sistem Pelaporan Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai hubungan positif secara signifikan yang menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah selaku penanggung jawab sistem pengelolaan keuangan dituntut untuk menyamakan laporan pertanggung jawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholdernya.

I. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H2: Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Sugiyono (2013:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Umi Narimawati (2010:29) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu.

Sugiyono (2011:147) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan

penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan diarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari.

Umi Narimawati (2010:290) mendefinisikan metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

A. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variable diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variable-variabel yang terkait dalam penelitian ini variable-variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. *Independent Variable (X)*

Sugiyono (2012:39) menyatakan variable independen atau variable bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat).

Adapun variable independen (X1) dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja sedangkan variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah Sistem Pelaporan Keuangan.

2. *Dependent Variable (Y)*

Sugiyono (2011:39) variabel dependen atau variable terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas.

Adapun variable dependen yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer yaitu dengan cara membagikan kuesioner untuk para pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat- Provinsi Jawa Barat. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, literature-literatur seperti deokumen perusahaan/buku/internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

1. Penelitian lapangan

Melakukan pengamatan secara langsung pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Serta wawancara dengan pimpinan atau ketua (BPKD) yang ada dilapangan dan Memberikan Kuesioner untuk mengumpulkan data yang sesuai di (BPKD) kabupaten Bandung Barat.

2. Setudi Kepustakaan.

Setudi Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari entitas, landasan teori, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara dokumentasi.

D. Populasi

Populasi adalah objek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah diteapkan untuk diteliti dan dipelajari. Populasi yang digunakan adalah jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

E. Sampel

Sugiyono (2014:118) Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relative kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

F. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jl. Ciloa. Mekarsari, Ngamrah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552.

Waktu Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Tanggal 3 Januari 2019 samapai 31 Maret 2019.

G. Uji Validitas

Suharsimi Arikunto (2013:211) Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau kesalihan sesuatu instrument.

H. Uji Reabilitas

Endang (2014:81) Reliabilitas unruk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument.

I. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif

Sugiyono (2013:169) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistic dengan uji persamaan structural berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama Partial Least Square (PLS) menggunakan software Smart PLS 3.0.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah didapatkan dari hasil kuisioner yang telah diserahkan oleh BPKD berkaitan dengan Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem

Pelaporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dikodekan (*coding*) serta diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variable yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation modeling* (SEM) menggunakan *Partial Least Square* (PLS) untuk menganalisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Peguji Kualitas Alat Ukur

1. Hasil pengujian Validitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah atau tidak valid suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai validitas $>0,30$. Dari hasil yang ada dari variabel pertama memiliki nilai 0,750, 0,861, 0,863, dan 0,688 sedangkan dari variabel kedua memiliki nilai 0,797, 0,760, 0,781, dan 0,783 dan variabel ketiga 0,811, 0,761, 0,775, 0,865 bahwa ketiga variable memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 ($>0,30$), sehingga seluruh

pernyataannya tersebut dinyatakan valid.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan tehnik belah dua atau sering *Split Half*. Yang diamana hasil dari variable pertama adalah 0,931 sedangkan variabel kedua 0,745 dan variabel ketiga memiliki nilai 0,862 bahwa ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliable dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliable) atau andal.

C. Analisis Deskriptif Anggaran Berbasis Kinerja

Pada tabel dibawah memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 1334 (63,52%) berada di antara interval 52,01 – 68,00% Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berda dalam katagori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Anggaran Berbasis Kinerja.

Tabel 1

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Orientasi yang sama pada hasil	351	525	66,86%	Cukup Baik
2	Penerapan rencana kinerja tahunan	323	525	61,52%	Cukup Baik
3	Pengembangan indikator kinerja	331	525	63,05%	Cukup Baik
4	Sistem pengumpulan data kinerja	329	525	62,67%	Cukup Baik
	Total	1334	2100	63,52%	Cukup Baik

Sumber: BPKD (2019)

D. Analisis Deskriptif Sistem Pelaporan Keuangan

Tabel 2

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Sistem Pelaporan Keuangan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Dapat dipahami	340	525	64,76%	Cukup Baik
2	Relevan	330	525	62,86%	Cukup Baik
3	Keandalan	338	525	64,38%	Cukup Baik
4	Dapat diperbandingkan	349	525	66,48%	Cukup Baik
	Total	1357	2100	64,62%	Cukup Baik

Sumber: BPKD (2019)

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Pelaporan Keuangan sebesar 1357 (64,62%) berada diantara interval 52,01% – 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pelaporan Keuangan berda dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masih

terdapat kelemahan dalam Sistem Pelaporan Keuangan.

E. Analisis Deskriptif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 3
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Dapat dipahami	340	525	64,76%	Cukup Baik
2	Relevan	330	525	62,86%	Cukup Baik
3	Keandalan	338	525	64,38%	Cukup Baik
4	Dapat diperbandingkan	349	525	66,48%	Cukup Baik
	Total	1357	2100	64,62%	Cukup Baik

Sumber: BPKD (2019)

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 1366 (65,05%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berada dalam katagori cukup baik, hal ini menunjukkan bahawa masih terdapat kelemahan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

F. Hasil Analisis Verifikatif Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara nilai korelasi

antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,906. Nilai 0,906 termasuk kategori kuat dengan nilai positif.

G. Hasil Analisis Verifikatif Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara Nilai Korelasi antara Sistem Pelaporan Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,926. Nilai 0,926 termasuk katagori sangat kuasa dengan nilai positif.

H. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Hasil pengujian dapat dilihat nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X1 diperoleh sebesar 8,987. Nilai tersebut lebih besar dari t_{kritis} 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 150 orang di Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Barat dengan kontribusi pengaruh sebesar 39,8%.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai $t_{\text{statistik}}$ untuk variabel X2 diperoleh sebesar 11,608. Nilai tersebut lebih besar dari t_{kritis} 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 105 orang dari Sub Bagian BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi pengaruh sebesar 51,9%.

I. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Anggaran Berbasis Kinerja (X1) sebesar 8,987 dengan nilai t tabel sebesar 1,984 dikarenakan t hitung lebih besar dari t tabel ($8,987 > 1,984$). Dari hasil penelitian besarnya pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebesar 39,8% dan sisanya sebesar 60,2% merupakan kontribusi dari variabel lain. Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 63,52% dan

termasuk kategori cukup baik yang artinya Anggaran Berbasis Kinerja cukup baik. Namun masih ada gap sebesar 36,48% yang merupakan masalah yang ada pada Anggaran Berbasis Kinerja.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Dedi Nordiawan (2011:27) bahwa kelemahan anggaran berbasis kinerja hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya dan banyak jasa dan aktivitas pemerintah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan, terkadang aktivitas diukur biaya secara detail dan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diperlukan atau tidak adanya aktivitas itu sendiri. Mursyidi (2013:58) Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi maksimal yang anggarannya disusun berdasarkan pada perkiraan biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.

Dan didukung oleh penelitian terdahulu oleh Laura Wahdatul, Sri Rahayu, Vanya Juliana Dillak (2016) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan. Komang Sri Endrayani (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

J. Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Sistem Pelaporan Keuangan (X_2) sebesar 11,608 dengan nilai t tabel sebesar 1,984, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($11,608 > 1,984$). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebesar 51,9% dan sisanya 48,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Hasil Analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64,62% dan termasuk Kategori cukup baik yang artinya Sistem Pelaporan Keuangan cukup baik. Namun masih terdapat gap sebesar 35,38% yang merupakan masalah yang ada pada Sistem Pelaporan Keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Indra Bastian (2010:297) laporan keuangan sektor public merupakan prestasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas sektor publik. Mahmudi (2016:251) menyatakan bahwa instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pelaporan Keuangan yang baik. Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya Sistem Laporan Keuangannya.

Teori di atas didukung oleh berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Laura Wahdatul, Sri Rahatu, Vaya Juliana Dillak (2016) hasil penelitian mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menurut Ni Made Mega Cahyani (2015) hasil penelitiannya menunjukkan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan arah hubungan yang positif.

5. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran Berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan termasuk katagori sangat kuat antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, artinya menunjukkan ketika Anggaran Berbasis Kinerja memberikan implementasi yang baik, maka hal tersebut semakin baik pula. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah /kendala seperti:

- a. Masih terdapat pegawai yang cukup kesulitan dalam melaksanakan atau menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja, dengan kurangnya informasi yang diberikan oleh manajer.
 - b. Masih terdapat pegawai yang hasil kerjanya tidak sesuai dengan atasan atau pimpinan BPKD.
2. Sistem Pelaporan Keuangan positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, artinya semakin baik diterapkannya Sistem Pelaporan Keuangan maka

tentu akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD di Kabupaten Bandung Barat semakin baik pula. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah/kendala seperti:

- a. Lemahnya Pembinaan pegawai dalam melakukan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Masih adanya pegawai yang tidak menjunjung integritas dan etika serta tanggung jawab atas sistem pelaporan keuangan di kantor tersebut.

B. Saran Operasional

BPKD diharapkan dapat meningkatkan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja agar mencapai target kinerja yang optimal mengacu kepada kegiatan-kegiatan dan program-program yang di biayai secara jelas termasuk efisiensi dan efektif. Dan juga memberikan informasi yang dibutuhkan pegawai dibidang anggaran berbasis kinerja yang ada di BPKD supaya sesuai dengan target kinerja yang ada di BPKD.

BPKD harus berupaya meningkatkan kualitas sistem pelaporan keuangan yang mengacu pada standar yang ada dengan memberikan pelaksanaan pelatihan

dan pembinaan pembukuan dengan basis akuntansi akrual sepenuhnya kepadaseluruh pegawai BPKD agar dapat lebih memahami dan mendalami aturan dalam pengelolaan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan diperlukan pengawasan dan pengendalian yang memadai guna mengotrol/menjaga sumber daya manusia agar terhindar dari perbuatan menyimpang menuju ranah yang berpotensi menimbulkan penyalagunaan sikap dan terintervensi negatife sehingga merubah pencarrab/penyusunan laporan keuangan yang tidak real.

C. Saran Akademis

Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Intansi pemerintah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pembaca.

Bagi Peneliti Lain Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak factor-faktor lain yang berpengaruh di luar model peneliti, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori

dan konsep yang diterima secara umum.

Daftar Pustaka

Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPPN.

Adisasmita Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bahri Syambudi P. 2012. *Pengaruh Pada Instansi Pemerintah*. Skripsi. Bandung Universitas Pasundan.

Dwi, Prastowo. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Edisi ketiga Yogyakarta : Sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.

Endrayani, Komang S.dkk.2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kehutanan UPTKPH Bali Tehngah Kota Singaraja. E-jurnal Jurusan Akuntanisi S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No1.

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Pubelik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Laura Wahdatul, Sri Rahayu, Vaya Juliana Dillak. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset

Riawan Tjandra. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Genesis.

Situs Media Online:

Sumiyati Surakarta. 2015. Permasalahan Impelentasi Anggaran Berbasis Kinerja (<http://solo.tribunnews.com/2016/07/07/2018>)

Holid Nurjamila. 2017. Nilai Kinerja Kabupaten Bandung Barat. (<http://jabar.tribunnews.com/2017/01/26>)